



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2015.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
7. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah ;
  - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Lampiran IKU SKPD sebagaimana dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

## BAB III

### KEGUNAAN

#### Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan ;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja ;
- c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

## BAB IV

### PENETAPAN IKU

#### Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kota Blitar tahun 2011 – 2015.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana strategis SKPD Tahun 2011 – 2015.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (out put) dan atau indikator hasil (outcome) sesuai dengan urusan fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
- a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 28 Maret 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 MARET 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2015

- I VISI : MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015
- II MISI : 1 Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan BerkeTuhanan Yang Maha Esa  
2 Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan  
3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata  
4 Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan  
5 Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Semangat Nasionalisme, Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Sejarah, Budaya Dan Kearifan Lokal	Jumlah even budayakhas Kota Blitar	Capaianjumlah even budayapadatahun tertentu	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Pelaksanaan Even Budaya	
		Tingkat partisipasi politik (%)	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang aktif dalam pemilu/pilkadapadatahun bersangkutan  ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang wajib mengikuti pemilu/pilkadapadatahun bersangkutan	- Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan hasil pemilih aktif dan pasif pada proses pemilu/pilkada	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai keagamaan	Prosentase lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an dan rekomendasikan dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain	Jumlah lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an/rekomendasi Dari pemuka agama ----- x 100% Jumlah peserta lulusan yang ikut seleksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Bagian Kesra Setda</li> <li>- Kemenag Kota Blitar</li> <li>- Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ul>	- Hasil test Uji Kemampuan Agama	
		Rasio tempat ibadah dibanding jumlah penduduk	Jumlah tempat ibadah ----- Jumlah penduduk		- Data Tempat Ibadah Kota Blitar	
		Konflik karena agama	Jumlah konflik karena agama		- Data program dan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama	
3.	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap norma sosial	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keindahan, kenyamanan)	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan polisi pamongpraja</li> <li>- Kecamatan dan Kelurahan</li> </ul>	Data Wilayah Kota Blitar	
		Prosentase poskamling aktif	Jumlah poskamling aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh poskamling		Data poskamling pada masing-masing kelurahan dan kecamatan	
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan	Prosentase guru berkualifikasi sesuai dengan kompetensi/guru layak	Jumlah guru berkualifikasi sesuai dengan kompetensi/guru layak (sesuai UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) ----- ----- x 100% Jumlah Guru	Dinas Pendidikan	Dapodik	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Rasio Guru dan murid	JumlahGuru dibandingkandenganjumlah murid		Dapodik	
		Rata-rata jumlah murid dalam 1 rombel	Jumlahmurid dalamsuatuSekolah ----- Jumlahrombelyang ada		Dapodik	
		ProsentasekelulusanUjianNasional	Jumlahsiswa yang lulus pendidikandasarand menengahdibagijumlahsiswa yang mengikuti UN dikalikan 100 %		Data Ujian Nasional	
		Rata-rata nilaiujiannasional	Jumlahnilaiujiannasionalsemuaswadibagijumlahsiswa yang mengikutiujian nasional		Data Ujian Nasional	
5.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Angkapartisipasimurni	Jumlahsiswakelompokusia yang bersekolah di tingkatpendidikan h padatahun tdibagijumlahpendudukkelompokusia yang berkaitandenganusiaSekolahstandar di tingkatpendidikan		BPS/ Dispendukcapil	
		AngkaputusSekolahmurni	Jumlahanak yang putusSekolahdi tingkat pendidikan dibandingjumlahsiswaditingkatpendidikantersebut		- IPM Kota Blitar - Profil Pendidik	
6.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf (%)	Jumlahpendudukusia 15 tahunkeatas yang dapatmembacadanmenulisdibagijumlahpendudukusia 15 tahunkeataskemudianhasilnyadikalikandenganseratus		- IPM Kota Blitar - Profil Pendidik	
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Jumlah lamasekolahseluruhpendudukdibagijumlahpenduduk yang bersekolah		Dapodik	
7.	Meningkatnyapelayanan kesehatan yang bermutu, meratadanterjangka	Rasioposyandubalita per RW	JumlahposyandubalitadibandingkandenganjumlahRW	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo	Laporan program seksi promosi kesehatan, sistem informasi dan	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	u				perijinan kesehatan Dinkes	
		Rasio posyandu lansia per kelurahan	Jumlah posyandu lansia dibandingkan dengan jumlah kelurahan		Laporan program seksi promosi kesehatan, sistem informasi dan perijinan kesehatan Dinkes	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%)	Jumlah masyarakat miskin pemegang jamkesmas/jamkesdad dibandingkan jumlah masyarakat miskin dikalikan 100%		Indikator Kinerja standar pelayanan minimal (SPM) Dinkes	
		Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	Jumlah tenaga medis X 100.000 dibagi jumlah penduduk		Data tenaga medis pada Dinkes dan data penduduk pada Di spondukcapil	
8	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan hidup	Rata-rata tahun hidup dijalani yang berhasil mencapai umur x		Data Proyeksi Dinkes dan BPS	
		Prevalensi balita gizi kurang (%)	Jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100%		Laporan program seksi kesehatan anak, remaja, usia lanjut dan gizi masyarakat pada Dinkes	
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama kali 1.000		Laporan program seksi kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi Dinkes	
		Angka kematian balita per	Jumlah balita usia sampai 59 bulan		Laporan program	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.000 kelahiranhidup	(bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah kelahiran hidup di suatuwilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 1.000		seksi kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi Dinkes	
		Angkakematianibumelahirkan per 100.000 penduduk	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurunwaktu tertentu di bagi Jumlah kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 100.000		Laporan program seksi kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi Dinkes	
9.	Meningkatnyainfras trukturPerekonomia nMasyarakat	Prosentasepanjangjaringanjal andalamkondisibaik	Panjangjalandalamkondisibaikdibagianpanjangja landikalikan 100%	- Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	- Data Jalan Kota Blitar - Kota Blitar dalam Angka	
		Prosentasepanjangjalan yang diterangi PJU	Panjangjalan yang diterangi PJU dibagianpanjangjalandikalikan 100%	- DinasPertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar	- Data jalandanPJU Kota Blitar - Kota Blitar dalam Angka	
		Prosentasejaringanirigasiterhadapluslahanbakusawah	Luas lahanbakusawah yang terjangkauirigasidibagijumlahseluruhluaslahanbakusawahdikalikan 100%		- Data jaringanirigasid anluaslahanbak usawahKota Blitar (DinasPertanian Perikanan dan Peternakan) - Kota Blitar dalam Angka	
10.	Meningkatnyausaha ekonomikerakyatan	Pertumbuhan PDRB	PDRB tahun t dikurangi PDRB tahunsebelumnyadibagi PDRB	- BAPPEDA - Dinas Koperasi dan	Data Statistik Kota Blitar	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
			tahun sebelumnya	UKM - Dinas Perindustrian dan perdagangan		
		Prosentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100% Jumlah Koperasi		Buku Profil Koperasi Kota Blitar	
11.	Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Prosentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin tahun 2015 dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2015 dikali 100%	- Dinas sosial dan tenaga kerja - Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BPS	
		IPM	Rata-rata dari jumlah Angka Harapan Hidup ditambah (2/3 Angka Meleak Huruf + 1/3 rata-rata lama sekolah) ditambah Indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	- BPS - Angka Harapan hidup - Angka Meleak huruf - Rata-rata lama sekolah - Indeks konsumsi per kapita	
12.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintah	Jumlah perempuan aktif dalam lembaga pemerintah dibagi jumlah perempuan keseluruhan dikali 100 %	- Bapemas dan KB - Dinas Kependudukan dan Pencapil	- Data program pemberdayaan perempuan - Data penduduk perempuan	
		Jumlah LPMK aktif	Capaian LPMK aktif dalam tahun tertentu	- Kecamatan dan Kelurahan	- Data LPMK	
13.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP	Jumlah penduduk ber KTP di bagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%	- Dispendukcapil - Inspektorat Seluruh SKPD - Dinas	Data Proyeksi Penduduk	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Perhubungan dan Kominfo - BagianOrtala		
		Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP denganpredikatbaik	Jumlah SKPD yang menerapkan SAKIP dengannilaiBaik di bagijumlah SKPDdikalikan 100%		LHE AKIP SKPD oleh Inspektorat Kota Blitar	
		Prosentaselembagapelayanan publik yang mempunyaiSPP	JumlahSKPD pelayananpublik yang menerapkan SPP dibagijumlahSKPD pelayananpublikdikalikan 100%		- Data SPP di lingkunganPe mkotBlitar - Data SKPD pelayananpub lik	
14.	Meningkatnyakualit aslingkunganhidup	Prosentase volume sampahyang tertangani	Jumlahsampahterangkutdibagijumlah volume sampahdikalikan 100%	- BLH - Dinas Pekerjaanumumda nPerumahan	Data Tahunan Bidang Lingkungan Hidup	
		Prosentase RTH Publik	Jumlah RTH publikdibagijumlahlahandikalikan 100%		Data Kota Blitar dalam Angka	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuaidenganaslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
KepalaBagianHukum

JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 19 TAHUN 2016  
TANGGAL : 28 MARET 2016

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR UTAMA

## KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD).....

NOMOR : 188/...../410...../20...

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
(SKPD)..... TAHUN 20.....

KEPALA (SKPD).....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.
11. Peraturan Walikota Blitar nomor :.....(tuposki SKPD)..

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan (SKPD)..... untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

- KEDUA : dokumen Renca Strategis (SKPD)... Tahun 2011 – 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD... dan disampaikan kepada Walikota Blitar maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal .....2016  
KEPALA SKPD

Ttd

.....

Salinan sesuaidenganaslanya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
KepalaBagianHukum

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 MARET 2016

CONTOH FORMAT LAMPIRAN IKU SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

.....(NAMA SKPD).....

TAHUN.... - .....

- I. VISI : ...
- II. MISI : ...
- III. TUGAS : ....
- IV. FUNGSI : ....

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.			
2.			
DST....			

KEPALA SKPD

Ttd

.....

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

JUARI  
 Pembina Tk. I  
 19651204 198603 1 006

